

## RINGKASAN

ALIFIA SEKAR DJAYANTHIE. Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara atas Kendaraan Dinas pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. *Accounting System for the Elimination of State Property of Service Vehicles at the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia*. Dibimbing oleh TAUFIK AWALUDIN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kegiatan penghapusan Barang Milik Negara merupakan tindakan untuk meniadakan Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu menguraikan kebijakan penghapusan BMN, menguraikan fungsi terkait penghapusan BMN atas kendaraan dinas, mengetahui dokumen dan catatan yang digunakan dalam penghapusan BMN atas kendaraan dinas, menguraikan jaringan prosedur dan menggambarkan bagan alir (*flowchart*) serta penggunaan aplikasi SIMAK BMN, juga menguraikan sistem pengendalian internal di Lemhannas RI. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dimulai tanggal 8 Februari-3 April 2021. Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dari data primer dan sekunder, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Penghapusan dapat menghemat anggaran pemerintah dengan mengurangi penggunaan berlebihan dan penyimpanan gudang kendaraan yang tidak digunakan, serta biaya pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Fungsi-fungsi yang terkait dengan penghapusan kendaraan dinas di Lemhannas RI yaitu Administrasi barang milik negara (Adm BMN), Kepala bagian rumah tangga (Kabag Rumga), Sekretaris Utama (Sestama), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau disebut dengan SIMAK BMN, aplikasi software yang dirancang oleh tim aplikasi sistem akuntansi keuangan sebagai alat pertanggungjawaban atas APBN yang didasarkan pada Sistem Akuntansi Instansi. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan di Lemhannas RI yang bertujuan untuk menghindari kecurangan atau penyimpangan dalam penyalahgunaan wewenang pada kegiatan pengelolaan barang milik negara yang berguna untuk menjaga kekayaan milik negara secara efektif dan efisien serta dapat memberikan jaminan terhadap kualitas kinerja dan tanggung jawab pemerintahan secara keseluruhan. Analisis penerapan sistem pengendalian internal pada Lemhannas RI melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penghapusan Barang Milik Negara, Aplikasi SIMAK BMN, Sistem Akuntansi.

